



PENETAPAN

Nomor 735/Pdt.P/2018/PA Dgl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Muhamad Tang bin Malaju, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Dusun III, Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Arniati binti Rurung, 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 735/Pdt.P/2018/PA Dgl pada tanggal 02 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Duda* (Cerai Mati) dalam usia 43 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2018/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Kandung Pemohon II bernama Rurung dan dihadiri saksi Nikah lebih dari dua orang di antaranya bernama Syamsuddin.H dan Lasse, mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun layaknnya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1998;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2018/PA Dgl



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1998 di Kecamatan Rio Pakava;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tanggal 21 Juni 2018 yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali perubahan pada posita angka 2 yaitu yang menikahkan adalah Kepala KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan posita angka 4, dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Winda Sari,
2. Iswandi,
3. Wanda Lestari;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi surat kematian istri pertama Pemohon I Nomor 145/1.247.32/Pem, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim Tunggal diberi Kode P;

B. Bukti Saksi

1. **Tahire bin Saleng**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang Campuran, bertempat tinggal di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1998;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2018/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Duda berumur 43 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 16 tahun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Rurung dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kepala KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 - Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Uang Rp 110.000,-, dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Syamsuddin.H dan Lasse;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
 - Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. Sakka bin Sagah**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, saksi adalah Paman Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1998;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Duda berumur

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2018/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 23 tahun;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Rurung dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asbar;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Uang Rp 110.000,-, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Agus dan saksi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilaksanakan di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti P dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2018/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat minimal pembuktian sesuai dengan Pasal 284 RBg dan bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2018/PA Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Mei 1998 di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Rurung yang selanjutnya memberi tauliyah kepada Kepala KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saksi-saksi nikahnya adalah Syamsuddin.H dan Lasse Kadir dengan mahar berupa Uang Rp 110.000,-, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan dalam rangka mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2018/PA Dgl



melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memenuhi persyaratan akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 20 Mei 1998, di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2018/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamad Tang bin Malaju**) dengan Pemohon II (**Arniati binti Rurung**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1998 di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan II biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 Hijriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi Rp. 5.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2018/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp **91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)**